

# PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, *MORALITAS SENSITIVITY* DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA DI KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI)

Eka Nur Anjani<sup>1)</sup>, Amy Wulandari<sup>2)</sup>, Nur Asih Triatmaja<sup>3)</sup>, Arif Nugroho Rachman<sup>4)</sup>, Sugiarti<sup>5)</sup>

<sup>1)2) 3)4)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Boyolali

Jl.Pandanaran No.405, Boyolali

<sup>5)</sup> Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Setiabudi Surakarta

e-mail: [ekanuranjani1909@gmail.com](mailto:ekanuranjani1909@gmail.com)<sup>1)</sup>, [amywulandari19@gmail.com](mailto:amywulandari19@gmail.com)<sup>2)</sup>, [nurasihtriatmaja@gmail.com](mailto:nurasihtriatmaja@gmail.com)<sup>3)</sup>, [arifnugroho.rachman@gmail.com](mailto:arifnugroho.rachman@gmail.com)<sup>4)</sup>, [titie\\_feusb@setiabudi.ac.id](mailto:titie_feusb@setiabudi.ac.id)<sup>5)</sup>

## ABSTRAK

*Fraud* merupakan suatu aktivitas pelanggaran ekonomi yang menyangkutkan penipuan didalamnya, dengan strategi memalsukan atau melakukan perubahan bukti dan keterangan informasi untuk target memungut keuntungan-keuntungan tertentu. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *moralitas sensitivity* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa pada seluruh desa di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian kuantitatif. Responden yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 45 perangkat desa dari 15 desa dengan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data mencakup penyebaran kuesioner secara *offline* kepada perangkat desa. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS 26. Kesimpulan yang dihasilkan adanya kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *moralitas sensitivity* dan *whistleblowing system* secara parsial masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dengan masing-masing nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ .

**Kata Kunci :** Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, *Moralitas sensitivity*, *Whistleblowing system*, Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

## ABSTRACT

*Fraud is an economic offense activity that involves fraud in it, with a strategy of falsifying or altering evidence and information for the target of collecting certain benefits. This study aims to see the effect of village apparatus competence, internal control system, moral sensitivity and whistleblowing system on fraud prevention in village financial management in all villages in Cepogo District, Boyolali Regency. The research method uses quantitative research type. Respondents used in this study included 45 village officials from 15 villages with purposive sampling technique. Data collection methods included distributing questionnaires offline to village officials. Data analysis techniques using multiple linear regression analysis with SPSS 26. The resulting*

*conclusion is that the competence of village officials, internal control system, moral sensitivity and whistleblowing system partially each have a positive and significant effect on fraud prevention in village financial management with a significant value of  $0.000 < 0.05$  each.*

**Keywords:** *Village Apparatus Competence, Internal Control System, Morality Sensitivity, Whistleblowing system, Village Financial Management Fraud Prevention*

---

## 1. Pendahuluan

Risiko kecurangan dan *fraud* di desa merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu risiko utama adalah penyalahgunaan dana desa, di mana aparat desa atau pihak terkait dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau proyek yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan. Selain itu, risiko pemalsuan dokumen seperti laporan keuangan atau dokumentasi proyek juga merupakan ancaman yang signifikan, dimana dokumen palsu digunakan untuk menyembunyikan penggunaan dana yang tidak benar. (Yuesti, 2023).

Kecurangan pengelolaan dana desa membentuk suatu potensi yang perlu diwaspadai, Ketua MPR RI memberikan penjelasan masih banyaknya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah desa. Tingginya anggaran desa yang cukup substansial. Tahun ini, anggaran desa yang disalurkan hampir mencapai Rp 70 triliun, sampai dalam tengah-tengah bulan Oktober 2023, telah tersalurkan sejumlah Rp 54,71 triliun, atau sepadan dalam persentase 78,2 persen dari keseluruhan dana yang tergelontor. Sementara itu akibat ramainya meopang dua acara besar dalam negeri, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) bertepatan pada 2024 dan Pemilihan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tertapatan juga 2024, aspek akibat dari penyelewengan anggaran desa tentunya menciptakan dalam pengalokasian anggaran desa untuk perlengkapan dalam perpolitikan. Contohnya pengalokasian anggaran desa untuk alat bersosialisasi mempromosikan calon tertentu, menciptakan anggaran desa untuk media dalam mewajibkan penyeleksian atau pembiasaan diri terhadap politik yang ditentukan atau menyelewengkan anggaran desa dalam agenda perpolitikan. Melihat dalam fakta keterangan yang ada penyelewengan anggaran desa kian terjumpai terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam akumulasi yang tergambar, didapati pada periode 2015 sampai dengan 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menemukan 851 masalah penyelewengan anggaran masyarakat sampai 973 tertuduh korupsi. (teks diambil dari [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id), diakses 16 Februari 2024).

Kecurangan pengelolaan anggaran desa yang tergambar di Indonesia cukup signifikan yang mana banyak sekali kepala desa selama ini terlibat dalam masalah korupsi kian terjadi kenaikan setiap tahun. Tahun 2019, kepala desa yang terlibat masalah penyelewengan anggaran desa mendapati 45 kepala desa. Tahun 2020, fenomena tersebut terjadi kenaikan sebesar 132 kepala desa, dan kembali terjadi kenaikan pada tahun 2021 sejumlah 159 kepala desa dan tahun 2022 sejumlah 174 kepala desa. Aspek pemicu besarnya kapasitas penyelewengan keuangan desa sebab tingginya dana desa sejumlah Rp 1,1 sampai dengan 1,3 miliar per desa, yang belum disamaratakan dengan pengokohan sarana pengawasan dan koreksi yang cukup signifikan. Juga hal tersebut, belum diselarasi kenaikan kinerja SDM pegawai desa sebagai administrator anggaran desa. (dikutip dari [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id) diakses pada 16 Februari 2024).

Berbagai kasus kecurangan juga pernah terjadi di Kecamatan Cepogo, salah satunya di Desa Mliwis pada tahun 2018, Kepala Desa Mliwis terlibat dalam kasus pemungutan liar (pungli). Kasus ini menimbulkan kegaduhan masyarakat setempat. Hal itu menyusul surat pemberitahuan dari Polres Boyolali kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat mengenai penetapan terlibat dalam masalah dugaan penyelewengan uang pengelolaan sertifikat lahan untuk program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) atau Proyek Operasi Agraria (Prona). Selain Kepala Desa, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut polisi menangkap ketua Program Prona di Desa Mliwis, yang terlibat masalah tersebut meminta tarif tertentu dari masyarakat peminta sejumlah Rp 1.100.000,- per sertifikat. Tahun 2018 tersebut sekitar 80 peminta, sejumlah 91 sertifikat telah diambil masyarakat dan 19 yang belum terambil, dari OTT tersebut petugas menyita uang tunai Rp 44.400.000,- dan berbagai macam berkas-berkas administrasi. Dampak dari kasus ini tidak hanya terbatas pada Kecamatan Cepogo atau Desa Mliwis saja, melainkan juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses pengurusan administrasi publik. Kasus tersebut menjadi sorotan media dan menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, guna menegakkan supremasi hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak (dikutip dari [www.fokus.jateng.com](http://www.fokus.jateng.com) diakses pada 16 Februari 2024).

Kasus diatas menjadi gambaran bahwa masih banyak ditemukannya kecurangan/*Fraud* dana desa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki wewenang tertentu dalam mengelola dana desa. Perlu adanya sistem tatanan pemerintah desa yang berkompetensi dalam bidangnya. Moralitas pribadi yang baik, sistem pengendalian/pengawasan yang bisa mengontrol keberpihakan internal pemerintah desa serta adanya sistem yang bisa digunakan masyarakat sebagai aduan apabila terjadinya penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga turut memperburuk situasi tersebut. Beberapa kasus penyelewengan dana desa seringkali terjadi karena adanya kerjasama antara aparat desa dan pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan integritas dan etika dalam pengelolaan keuangan desa serta perlunya peran serta aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan potensi kecurangan. (Yuesti, 2023). *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh banyak aspek antara lain kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pegawai desa sebagai aparatur desa, rendahnya sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, *moralitas sensitivity* individu yang rendah dan kurangnya wadah *whistleblowing system* untuk pelaporan. (Harianto, dkk 2022).

Adapun rumusan masalah yang akan ditelaah dalam kajian ini mencakup bagaimana pengaruh secara parsial kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *moralitas sensitivity* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (studi kasus Desa di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali). Tujuan untuk melihat dan memeriksa secara parsial pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *moralitas sensitivity* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Studi kasus desa di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali).

## 2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

### 2.1 Teori *Stewardship*

Menurut (Donaldson & Davis, 1989) teori *stewardship* menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu. Dalam teori ini, manajemen bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa manajemen atau pemerintah desa (*steward*) akan melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya demi kepentingan bersama (masyarakat) sehingga kesejahteraan masyarakat (*principal*) dapat dicapai. (Poluto dkk, 2022)

### 2.2 Pencegahan *fraud* keuangan desa

*Fraud* merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungankeuntungan tertentu. (Harianto, dkk 2022)

### 2.3 Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi aparatur desa adalah tatanan dasar kepribadian suatu individu dan menunjukkan gaya bertingkah laku, berpikir, menelaraskan keadaan tertentu, dan mendukung dalam kurun waktu yang bisa dikatakan lama (Situmeang, dkk 2023). Kompetensi aparatur desa adalah tatanan dasar kepribadian suatu individu dan menunjukkan gaya bertingkah laku, berpikir, menelaraskan keadaan tertentu, dan mendukung dalam kurun waktu yang bisa dikatakan lama (Aprilia dan Yuniasih, 2021).

### 2.4 Sistem Pengendalian Internal

Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 memberikan definisinya sistem pengendalian internal (SPI) merujuk pada strategi/cara yang terstruktur pada aktivitas dan perbuatan yang dilaksanakan dengan konsisten oleh yang memiliki kekuasaan dan semua aparat guna mengajarkan keyakinan yang mencukupi atas tergapainya sasaran dan target organisasi melewati aktivitas dan tindakan yang produktif dan hemat, kepercayaan akan laporan finansial desa, terjaganya kekayaan negara, dan ketertiban mengenai aturan-aturan yang didasarkan undang-undang. Sementara kita tahu bahwa sistem pengendalian internal cenderung rendah maka mampu memotivasi seorang individu pegawai melakukan penyelewengan.

### 2.5 *Moralitas sensitivity*

*Moralitas sensitivity* merupakan tingkah laku baik dan buruk yang dipunyai oleh seorang individu (Islamiyah dkk, 2020). Menurut (Aprilia dan Yuniasih, 2021) Moralitas dapat tercermin melalui aktivitas atau ucapan seseorang saat berhubungan dengan orang lain. Seseorang dianggap memiliki moralitas yang baik jika tindakan mereka sesuai dengan nilai etika moral yang biasa dianut atau diyakini oleh masyarakat disana dan bisa memberikan kebahagiaan untuk mereka.

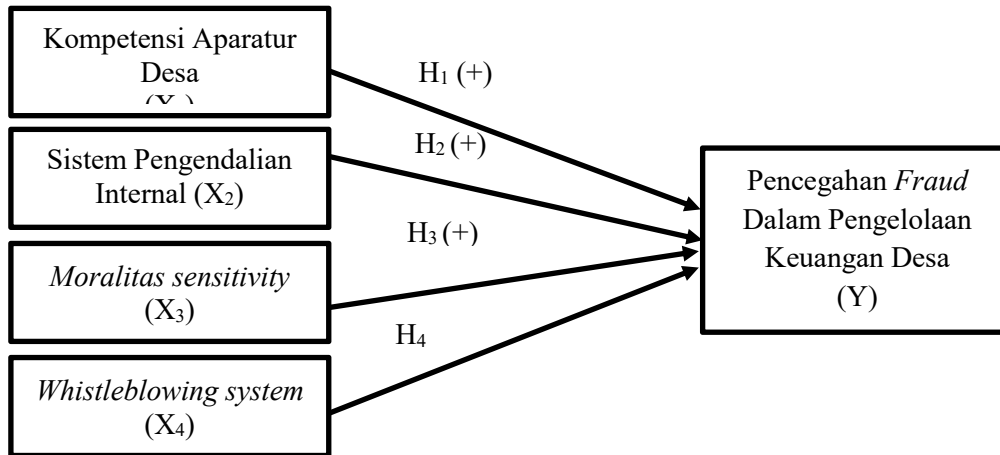
### 2.6 *Whistleblowing system*

*Whistleblowing system* merupakan media atau wadah yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan adanya penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran yang dijalankan oleh suatu internal organisasi, apabila sistem *whistleblowing* bisa menciptakan rasa tenang serta terjaga akan kerahasiaan para

pelapor sehingga mereka lebih percaya diri mengadukan perkara yang dianggap menyeleweng dan tidak akan mengakibatkan pelapor merasa terasingkan, maka sistem tersebut memiliki mutu sistem *whistleblowing* yang bagus (Mahdi & Darwis, 2020).

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. metode kuantitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk mengambil keputusan manajerial dan ekonomi, metode kuantitatif merupakan ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara (metode) pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi terhadap hasil analisis untuk bisa mendapatkan informasi untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. (Sugiyono, 2019)

### 3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 137 aparatur desa di Kecamatan Cepogo, Kabupaten, Boyolali. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih secara cermat dengan cara mengambil orang atau objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri spesifik

### 3.3 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, penyebaran kuesioner fokus pada aparatur desa, yaitu: kepala desa, sekretaris desa dan kaur keuangan.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Instrumen Data

###### 1. Uji validitas

Tabel 4.1

Variabel	Indikator	Nilai Sig	Nilai dasar	Keterangan
Kompetensi aparatur desa	X <sub>1</sub>	0,000	0,05	Valid
Sistem pengendalian internal	X <sub>2</sub>	0,000	0,05	Valid
<i>Moralitas sensitivity</i>	X <sub>3</sub>	0,000	0,05	Valid
<i>Whistleblowing system</i>	X <sub>4</sub>	0,000	0,05	Valid
Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	Y	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Dari paparan tabel dijelaskan adanya kompetensi aparatur desa (X<sub>1</sub>) sebesar 0,000, kemudian sistem pengendalian internal (X<sub>2</sub>) sebesar 0,000, *moralitas sensitivity* (X<sub>3</sub>) sebesar 0,000 dan *whistleblowing system* (X<sub>4</sub>) sebesar 0,000serta pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 0,000 dinyatakan valid karena nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05.

###### 2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.2  
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach		Keterangan
	Cronbach Alpha	Alpha Dasar	
Kompetensi aparatur desa	0,903	0,70	Reliabel
Sistem pegendalian internal	0,783	0,70	Reliabel
<i>Moralitas sensitivity</i>	0,864	0,70	Reliabel
<i>Whistleblowing system</i>	0,806	0,70	Reliabel
Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	0,806	0,70	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Dari paparan tabel dijelaskan adanya kompetensi aparatur desa (X<sub>1</sub>) sebesar 0,903, kemudian sistem pengendalian internal (X<sub>2</sub>) sebesar 0,783, *moralitas sensitivity* (X<sub>3</sub>) sebesar 0,864 dan *whistleblowing system* (X<sub>4</sub>) sebesar 0,806 serta pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa sebesar 0,806 dinyatakan reliabel karena nilai signifikansinya lebih tinggi dari 0,70.

## 4.2 Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

**Tabel 4.3**  
**Uji Normalitas**

Keterangan	Unstandardized Residual	Keterangan
Asymp. Sig (2-tailed)	0,174	Normal

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil paparan tabel diatas nilai daripada Asymp. Sig normalitas sebesar 0,174, yang berarti tidak signifikan terhadap  $>0,05$  maka dikatakan data normal.

### 2. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.4**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Nilai Signifikan	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa ( $X_1$ )	0,769	Tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ )	0,673	Tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas
<i>Moralitas sensitivity</i> ( $X_3$ )	0,059	Tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas
<i>Whistleblowing system</i> ( $X_4$ )	0,869	Tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil paparan tabel dijelaskan nilai daripada masing-masing nilai sig pada variabel kompetensi aparatur desa ( $X_1$ ) sebesar 0,769, kemudian sistem pengendalian internal ( $X_2$ ) sebesar 0,673, *moralitas sensitivity* ( $X_3$ ) sebesar 0,059 dan *whistleblowing system* ( $X_4$ ) sebesar 0,869, dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel lebih dari 0,05 dan menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### 3. Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.5**  
**Uji Multikolinieritas**

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X <sub>1</sub> )	0,963	1,039	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sistem Pengendalian Internal (X <sub>2</sub> )	0,949	1,054	Tidak Terjadi Multikolinieritas
<i>Moralitas sensitivity</i> (X <sub>3</sub> )	0,809	1,235	Tidak Terjadi Multikolinieritas
<i>Whistleblowing system</i> (X <sub>4</sub> )	0,850	1,176	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil paparan tabel dijelaskan nilai daripada masing-masing VIF pada variabel kompetensi aparatur desa (X<sub>1</sub>) sebesar 1,039, kemudian sistem pengendalian internal (X<sub>2</sub>) sebesar 1,054, *moralitas sensitivity* (X<sub>3</sub>) sebesar 1,235 dan *whistleblowing system* (X<sub>4</sub>) sebesar 1,176, apabila nilai tolerance dibawah <10,00 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

### 4. Uji Autokorelasi

**Tabel 4.6**  
**Uji Autokorelasi**

Durbin watson	Hasil ( $dU \leq DW \leq 4-dU$ )	Kesimpulan
1,795	$1,7200 \leq 1,795 \leq 2,28$	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Hasil uji autokorelasi di atas dapat dijelaskan nilai durbin-watson adalah 1,795 maka dalam pengujian ini menggunakan rumus  $du \leq DW \leq 4-du$ , dengan asumsi jika nilai  $DW \geq 4-du$  maka diartikan terjadi autokorelasi tetapi jika nilai  $DW \leq 4-du$  maka diartikan tidak terjadi autokorelasi dalam pengujian ini dari jumlah sampel (n=45), maka dilihat dari tabel statistik diperoleh hasil du adalah 2,28 serta nilai DW=1,795, jika masukan diasumsi uji autokorelasi maka hasil  $du \leq DW \leq 4-du$  ( $1,7200 \leq 1,795 \leq 2,28$ ) maka disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

### 4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.7**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel Constanta	Nilai Unstandardized Coefficients (B)	t hitung	Sig
Constanta	-18,583	-25,622	0,000
Kompetensi Aparatur Desa (X <sub>1</sub> )	0,227	26,327	0,000
Sistem Pengendalian Internal (X <sub>2</sub> )	0,418	38,009	0,000
<i>Moralitas sensitivity</i> (X <sub>3</sub> )	0,207	15,887	0,000
<i>Whistleblowing system</i> (X <sub>4</sub> )	0,733	43,352	0,000

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Dari data hasil uji analisis linier berganda diatas maka dapat dijelaskan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -18,583 + 0,227 X_1 + 0,418 X_2 + 0,207 X_3 + 0,733 X_4 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat ditarik penjelasannya sebagai berikut:

1. Nilai (constant) adalah sebesar -18,583 artinya jika variabel independen atau bebas adalah bernilai nol, maka variabel dependen atau terikat oleh nilai -18,583 dalam penelitian ini, jika pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *moralitas sensitivity* dan *whistleblowing system* bernilai nol (0), maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa bernilai -18,583.
2. Nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparatur desa (X<sub>1</sub>) mengarah positif, jika variabel kompetensi aparatur desa (X<sub>1</sub>) mengalami kenaikan sebesar 0,227, maka variabel Y juga mengalami kenaikan sebesar 0,227.
3. Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X<sub>2</sub>) mengarah positif, jika variabel sistem pengendalian internal (X<sub>2</sub>) mengalami kenaikan sebesar 0,418, maka variabel Y juga mengalami kenaikan sebesar 0,418.
4. Nilai koefisien regresi variabel *moralitas sensitivity* (X<sub>3</sub>) mengarah positif, jika variabel *moralitas sensitivity* (X<sub>3</sub>) mengalami kenaikan sebesar 0,207, maka variabel Y juga mengalami kenaikan sebesar 0,207.
5. Nilai koefisien regresi variabel *whistleblowing system* (X<sub>4</sub>) mengarah positif, jika variabel *whistleblowing system* (X<sub>4</sub>) mengalami kenaikan sebesar 0,733, maka variabel Y juga mengalami kenaikan sebesar 0,733.

#### 4.4 Uji Hipotesis

##### 1. Uji t (Parsial)

**Tabel 4.8**  
**Uji t (Parsial)**

Variabel	P value	t hitung	Sig	Kesimpulan
Kompetensi Aparatur Desa ( $X_1$ )	$P < 0,05$	26,327	0,000	$H_1$ Diterima
Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ )	$P < 0,05$	38,009	0,000	$H_2$ Diterima
<i>Moralitas sensitivity</i> ( $X_3$ )	$P < 0,05$	15,887	0,000	$H_3$ Diterima
<i>Whistleblowing system</i> ( $X_4$ )	$P < 0,05$	43,352	0,000	$H_4$ Diterima

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Dari perhitungan uji t menunjukkan bahwa:

- Hasil pengujian t menunjukkan skor dari sig kompetensi aparatur desa ( $X_1$ ) ditemukan  $0,000 < 0,05$ , sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hipotesis yang memberikan pernyataan “kompetensi aparatur desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa Di Desa Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”.
- Hasil uji t memperlihatkan nilai sig sistem pengendalian internal ( $X_2$ )  $0,000 < 0,05$ . dengan begitu dapat dilakukan penarikan simpulan bahwasanya hipotesis yang memberikan “sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa Di Desa Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”.
- Hasil uji t pengujian memperlihatkan nilai sig pada *moralitas sensitivity* ( $X_3$ )  $0,000 < 0,05$ . atas dasar hal tersebut dapat dilakukan penarikan simpulan bahwasanya hipotesis yang menyatakan “*moralitas sensitivity* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa Di Desa Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”.
- Hasil uji t menunjukkan nilai sig *whistleblowing system* ( $X_4$ )  $0,000 < 0,05$ . dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hipotesis yang menyatakan “*whistleblowing system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa Di Desa Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”.

##### 2. Uji F (Simultan)

**Tabel 4.9**  
**Uji F (Simultan)**

Keterangan	P value	F hitung	Sig	Kesimpulan
$X_1, X_2, X_3$ dan $X_4$ Terhadap Y	$P < 0,05$	1274,993	0,000	Semua variabel independen berpengaruh signifikan

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Dari data tabel hasil uji f atau uji secara simultan maka dapat dijelaskan, dengan jumlah  $n=45$ , nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$  maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa variabel varian kompetensi aparatur desa ( $X_1$ ), sistem pengendalian internal ( $X_2$ ), *moralitas sensitivity* ( $X_3$ ) dan *whistleblowing system* ( $X_4$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa ( $Y$ ).

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.10**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Keterangan	Adjusted R Square	Kesimpulan
$X_1, X_2, X_3$ dan $X_4$ Terhadap $Y$	0,991	$0,991 \times 100\%$

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Didapati nilai skor atas determinasi yang dilakukan penyesuaiannya (*adjusted R<sup>2</sup>*) ialah 0,991 atau 99,1%. Artinya dari keseluruhan variabel yang bebas pada penelitian ini yakni kompetensi aparatur desa ( $X_1$ ), sistem pengendalian internal ( $X_2$ ), *moralitas sensitivity* ( $X_3$ ) dan *whistleblowing system* ( $X_4$ ) terhadap variabel dependen pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa ( $Y$ ) 99,1% dan sisa variabel lain yang tidak diteliti sebesar 0,9%.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.2 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil analisa didapat simpulan yang dihasilkan sebagai berikut:

- Hasil uji t dengan analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , kompetensi aparatur desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima
- Hasil uji t dengan analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga menyimpulkan bahwa  $H_2$  diterima
- Hasil uji t dengan analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , *moralitas sensitivity* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dan hipotesis  $H_3$  diterima
- Hasil uji t dengan analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , *whistleblowing system* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga  $H_4$  diterima

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

- Hasil penelitian merupakan gambaran satu Kecamatan Cepogo dalam lingkup kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *moralitas sensitivity* dan

*whistleblowing system* serta indikator dari pernyataan kuesioner belum menggambarkan pengaruh secara menyeluruh dan perlu memperluas objek dari penelitian yang ada.

2. Hasil penelitian ini hanya mengacu berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner, sehingga hasil yang diperoleh tidak seutuhnya mampu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Keterbatasan responden hanya mencakup 3 perangkat utama desa, belum termasuk dalam anggota perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas kinerja keuangan desa.

### 5.3 Saran

- a. Disarankan menambah jumlah sampel terutama mengikutsertakan Perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebab badan inilah yang menjadi tolok ukur desa dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa.
- b. Disarankan dapat menambah variabel independen lainnya diluar variabel pada penelitian ini seperti akuntabilitas, karena akuntabilitas sering kali menjadi faktor penting dalam banyak konteks, seperti kinerja organisasi, transparansi, dan kepercayaan publik. Menambahkan variabel ini dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian yang lebih relevan dan mendalam terkait pengaruh akuntabilitas terhadap hasil yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Harianto; Rahardjo, Murdji; Baru, Bambang Martin.(2022).Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi.UD Dalle Nurul Utama. Surabaya
- [2] Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- [3] Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desan Dan Wistleblowing Sistem Terhadap Pencegahan Fraud, Dengan Kecerdasan Spritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(2).
- [4] Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 89-101.
- [5] Situmeang, B. J., Simanjuntak, R., & Lolo, T. S. A. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2414-2422.
- [6] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- [7] Yuesti, Anik.(2023). *Akuntansi Dana Desa*. Sidoarjo. Zifatama Jawara